

BULETIN TFCA KALIMANTAN

Media Informasi Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kalimantan



EKONOMI

Momentum Festival Danau Sentarum 2022 menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk mempromosi produk HHBK dan ekowisata menuju kebangkitan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Apa saja yang di promosikan?



SATWA LIAR

Status Langur Borneo di Danau Sentarum, dan Buaya Siam di Lahan basah Mesangat Suwi, masuk dalam daftar merah IUCN terancam punah (CR). Bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan habitat satwa liar di Kalimantan?



EKOWISATA

Tren meningkatnya wisatawan ke Berau, tentu harus diimbangi dengan pemberian dan pengembangan fasilitas di objek-objek wisata yang ada. Apa saja tantangan nya kedepan?

Perhitungan Penurunan
Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)
Kabupaten Berau

Studi ini dilakukan untuk melakukan penghitungan kontribusi program TFCA Kalimantan melalui proyek yang dijalankan mitra pada penurunan emisi GRK PKHB.

Bagaimana metode dan hasil perhitungan nya?

TIM REDAKSI

BULETIN TFCA KALIMANTAN- EDISI KETIGA

Media informasi konservasi keanekaragaman hayati di Kalimantan

Penanggung Jawab: Direktur Program TFCA Kalimantan

- Kontributor:**
- Puspa D. Liman
 - Herman Suparman Simanjuntak
 - Heri Wiyono
 - Syahru Ramdhoni
 - Ahfi Wahyu Hidayat
 - Mitra TFCA Kalimantan

Desain dan Tata Letak: Heri Wiyono

Dokumentasi: TFCA Kalimantan

Informasi dan saran dapat menghubungi:

tfca.kalimantan@kehati.or.id

Jl. Benda Alam I No.73, RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. 12560 | (021) 78342866

Tahun 2023

2022

TFCA - Kalimantan Dalam Angka



Hutan, Ekosistem, dan Keanelekteragaman Hayati Terlindungi



Investigasi peredaran satwa liar di Kalimantan Barat

Dengan temuan 17 kejadian dan 16 kasus peredaran ilegal satwa liar telah masuk pengadilan dengan putusan hukum

Pelepasliaran dan Rescue 138 satwa

Diantaranya orangutan, badak Sumatra, telenjiau, rancakong/kancakeng hitam, dan bangau tong-tong, Buaya Badak dan Langur Borneo



Penyediaan data identifikasi dan inventarisasi, serta konservasi habitat 11 Spesies kunci:

Orangutan, Rangkong, Badak Sumatra, Arwana, Pesut, Gajah, Banteng, Bekantan, Langur Borneo, Buaya Badak, dan Bangau Storm



Menguatnya Praktik Mitigasi Perubahan Iklim

1.005,81 ha area direhabilitasi

Dengan pengkayaan tanaman



516.521,12 ha luas hutan terlindungi

Melalui 7 skema legalitas formal perlindungan



7 aksi mitigasi:

Penanaman / pengkayaan lahan, pengamanan kawasan, pencegahan kebakaran hutan, pengaturan tata guna lahan, pengajuan legalitas kawasan, pengomposan, instalasi panel surya





Tegakan Pohon Hutan Desa Kensuray, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat-I PHD Kensuray

isi

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Informasi Program TFCA Kalimantan | 8 3,8 Ribu Hektar Mangrove di Berau Dimaanfaatkan secara Lestari | 13 Kapuas Hulu Promosikan Produk Unggulan KUPS pada FDS 2022 |
| 3 Masa Depan Wisata Berau | 9 Pembalak Liar di Melawi Menjadi Wirausaha | 14 Perhitungan Penurunan GRK di Kabupaten Berau |
| 5 Menguak Misteri Monyet Tiga Warna | 10 Rehabilitasi Mangrove di Delta Mahakam | |
| 7 Si Hitam Siam Penghuni Lahan Basah Mesangat Suwi dalam Daftar Merah | 11 LPHD di Kapuas Hulu Bertekad Menjaga Hutan Desa | |

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, administrator TFCA Kalimantan dapat menyelesaikan penyusunan buletin edisi.3/vol.1-TFCAK/2023. Pada edisi ini administrator menginformasikan berbagai hasil kegiatan program dalam upaya perlindungan satwa liar, pengembangan produk wisata dan tantangannya, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, serta perhitungan emisi karbon. Selama berkegiatan, tentunya ada banyak informasi untuk disampaikan kepada publik mengenai capaian dan tantangan yang bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang.

Tujuan diterbitkan buletin ini untuk memberikan informasi tentang proses, kegiatan, capaian dan tantangan selama melaksanakan kegiatan program TFCA Kalimantan, sekaligus sebagai sarana media komunikasi untuk mendukung program kerja yang akan datang.

Diharapkan buletin ini dapat berkembang dan terbit secara konsisten. Oleh karena nya, redaksi mengharapkan kontribusi dari mitra, fasilitator wilayah, administrator, dan pihak-pihak terkait yang dapat memperkaya informasi terkait program TFCA Kalimantan untuk penyusunan buletin berikut nya.

Akhir kata, administrator mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan buletin ini.

Salam Lestari

Ir. Puspa Dewi Liman, M.Sc.
Direktur Program TFCA Kalimantan



PENDAHULUAN

Rangkong Badak di Hutan Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Pinterst

Program Tropical Forest Conservation Act kedua (TFCA-2) adalah program kerjasama pengalihan utang antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang fokus berkegiatan di Kalimantan. Program yang selanjutnya disebut TFCA Kalimantan ini kemudian menunjuk Yayasan KEHATI sebagai administrator program.

Nilai pendanaan TFCA-Kalimantan sebesar USD 28,5 juta. Sebesar 80% alokasi pendanaan digunakan untuk mendukung Program Karbon Hutan Berau (PKHB) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan inisiatif Heart of Borneo (HoB) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Kutai Barat serta Mahakam Ulu di Kalimantan Timur.

Sisa 20% alokasi pendanaan diperuntukkan bagi program Investasi Strategis (IS) yang berkegiatan di luar kabupaten sasaran dengan prioritas untuk mendukung PKHB dan inisiatif HoB. Hingga 2022, Program IS telah menyasar Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah; Kutai Kartanegara, Balikpapan dan Kutai Timur di Kalimantan Timur; Nunukan, Malinau serta Tarakan di Kalimantan Utara dan seluruh kabupaten di Kalimantan Barat kecuali Kapuas Hulu (kabupaten target inisiatif HoB)

Tujuan program TFCA-Kalimantan adalah: (1) perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, DAS, koridor untuk mewujudkan manfaat penyelamatan kehuti dan perubahan iklim; (2) peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam lestari dan pemanfaatan lahan rendah emisi;

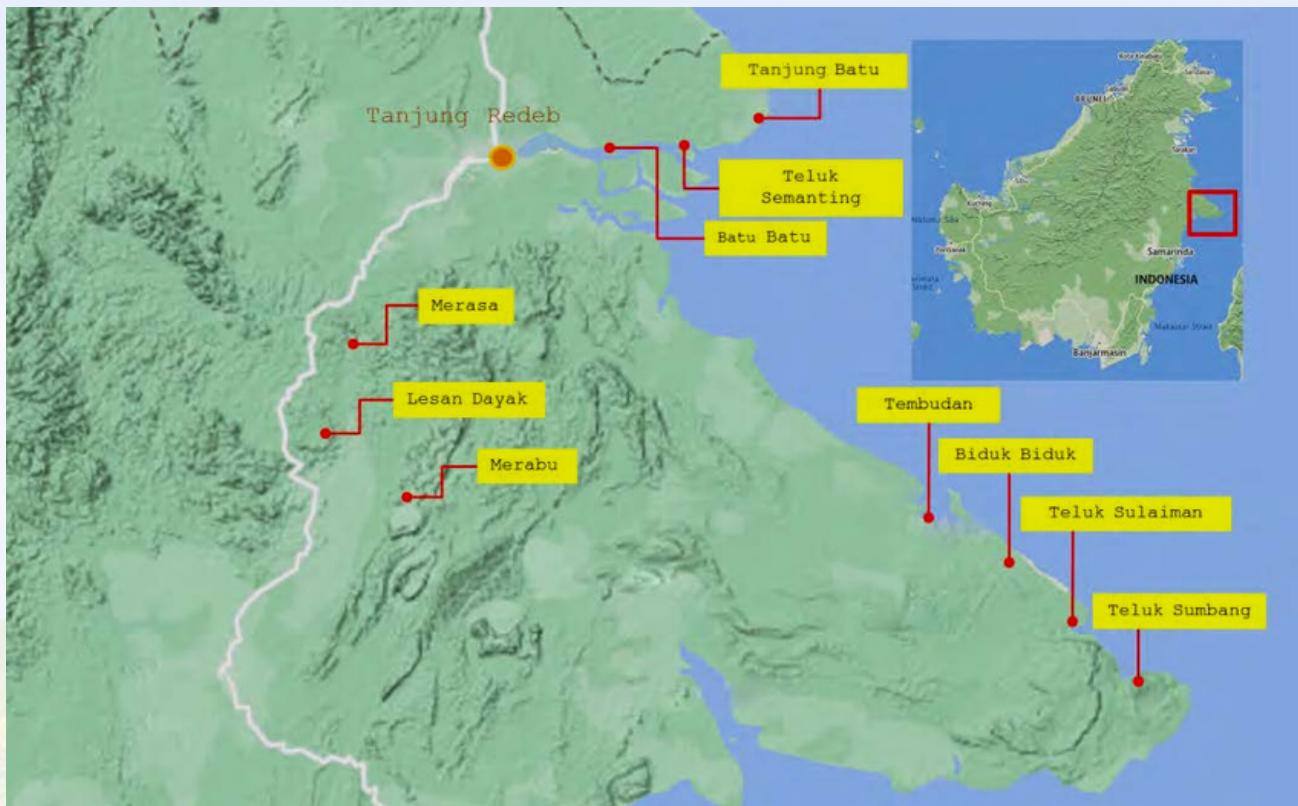
(3) pelaksanaan DA-REDD/REDD+ pada kabupaten terkait dalam rangka kontribusi pengurangan emisi GRK; (4) pembelajaran pelaksanaan program dan pengelolaan pengetahuan bagi pengembangan kerangka konservasi dan REDD+.

Sampai dengan akhir Desember 2022 TFCA-Kalimantan telah bekerjasama dengan 80 mitra, sebanyak 57 mitra telah menyelesaikan program dan 23 mitra masih berkegiatan di lapangan hingga semester pertama tahun 2023.

MASA DEPAN WISATA BERAU

Pariwisata dapat menjadi sektor baru sebagai sumber perekonomian di Berau, Kalimantan Timur. Namun ada beberapa tantangan yang membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Kabupaten Berau memiliki jumlah objek wisata yang banyak, namun sampai saat ini destinasi wisata di Berau masih berfokus pada destinasi tertentu saja dan belum dapat bersaing dengan destinasi wisata di luar daerah. Perlu adanya inovasi pengemasan produk wisata yang beragam dan unik sehingga minat wisatawan meningkat dan dapat beralih destinasi wisata ke Kabupaten Berau Kalimantan Timur.





Sebaran lokasi kajian produk wisata di Berau. (Indecon)

Tantangan Pengembangan Wisata di Berau

Dalam dunia Konservasi keanekaragaman hayati (kehati) selain dilakukan upaya perlindungan, aspek pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga merupakan aspek yang sangat penting. Salah satu strategi menguatkan konservasi kehati yang sudah sering dilakukan adalah melalui pengembangan pariwisata.

Pariwisata yang di dalamnya juga meliputi ekowisata; merupakan salah satu cara dalam memadukan upaya konservasi dan pembangunan ekonomi, karena pariwisata dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghindari kegiatan yang bersifat destruktif.

Untuk menguatkan upaya konservasi kehati dan mendorong pembangunan ekonomi di Kalimantan, program TFCA Kalimantan telah kerjasama dengan Yayasan Ekowisata Indonesia (INDECON), melakukan kajian awal produk ekowisata di beberapa wilayah Kalimantan dalam rangka memberikan

gambaran prospek pembangunan pariwisata di lokasi tersebut. Salah satu lokasi kajian adalah Kabupaten Berau, yang telah terdapat kegiatan pariwisata khususnya di Kepulauan Derawan.

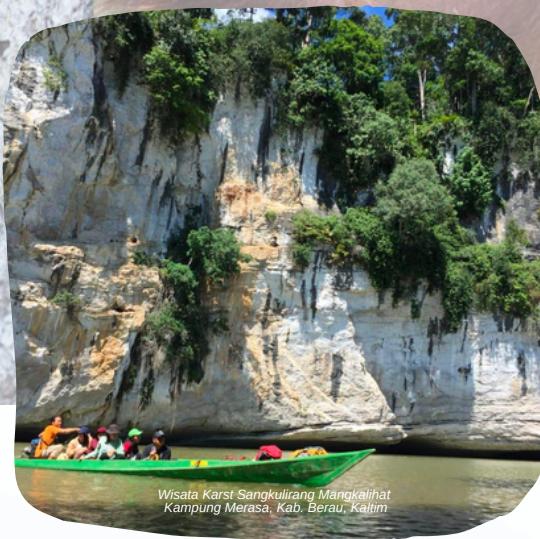
Sementara pariwisata pada wilayah pesisir baru mulai menggeliat, yang kemudian disusul oleh beberapa lokasi tujuan wisata lain melalui dukungan program TFCA Kalimantan, seperti di Tanjung Batu, Teluk Semanting, Batu-Batu, Lesan Dayak, Merasa, Merabu, Tembusan, Biduk-Biduk, Sigending, Teluk Sulaiman, Teluk Sumbang dan di Labuan Cermin.

Kajian produk ekowisata di Berau membidik beberapa aspek, seperti daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitis, produk wisata pasar wisata, rantai pasokan, kelembagaan pariwisata dan kapasitas pelaku, kontribusi pengelolaan wisata, kondisi pemungkin yang terkait dengan kebijakan pemerintah serta tantangan pengelolaan wisata.



Wisata Mangrove-Tanjung Batu-Kab.Berau, Kaltim

Tanjung batu terletak di Kecamatan Pulau Derawan dengan jarak sekitar 120 Km dari Tanjung Redeb. Di lokasi tersebut terdapat jembatan kayu untuk menjelajahi keragaman mangrove dan dengan menaiki menara pandang yang tingginya 10 meter, dapat menikmati pemandangan ekosistem mangrove yang asri.



Wisata Karst Sangkulirang Mangkalihat
Kampung Merasa, Kab. Berau, Kaltim

Batu-batu terletak di kecamatan Gunung Tabur, jarak sekitar 43 Km dari Tanjung Redeb. Melalui susur sungai pada jam 07.00 – 09.00 dan 15.00 – 17.00 setiap hari dapat disaksikan aktifitas Bekantan di habitat aslinya.



Wisata Pengamatan Bekantan di Batu-batu
Kab.Berau, Kaltim

Kampung Merasa terletak di Kecamatan Kelay, dengan jarak sekitar 70 Km dari Tanjung Redeb dengan melintasi beberapa perkampungan dan hutan tropis. Kampung Merasa memiliki keindahan alam yang sangat menarik, serta masyarakat yang masih menjaga kelestarian budayanya.

Dari hasil kajian produk ekowisata di Berau, diperoleh informasi bahwa walaupun di Berau terdapat sejumlah obyek wisata, namun baru sebagian lokasi yang memiliki produk perjalanan wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat lokal dengan kapasitas terbatas.

Sejumlah tantangan dalam pengembangan wisata di Berau, seperti membangun peta jalan yang berbeda bagi produk wisata yang dikembangkan di beberapa lokasi; misalnya wisata mangrove, agar pengunjung dapat memperoleh interpretasi dan pengalaman yang berbeda. Selain itu, aksesibilitas yang belum memadai, kapasitas pengelola wisata masih terbatas, kebijakan pemerintah daerah belum maksimal mendukung pengembangan wisata. Saat ini pemerintah Kabupaten Berau telah memiliki dokumen pola perjalanan wisata, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dan masih terpusat di kepulauan Derawan.

Secara umum berwisata di Berau, selain menawarkan keindahan alam, juga dapat dilakukan berbagai aktifitas di ekosistem mangrove dan karst, susur sungai dan pantai, pengamatan satwa endemik Kalimantan di habitat alamnya, memahami budaya dan adat masyarakat Dayak, serta tentunya tidak ketinggalan kuliner setempat dan sejumlah oleh-oleh yang dapat dibawa pulang.

Memperhatikan pelaksanaan pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang berada di Kaltim saat ini, serta keinginan Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengharapkan agar pembangunan IKN juga harus dapat mendorong pembangunan wilayah lain di Kaltim, maka dengan potensi keanekaragaman hayati dengan mengembangkan ekowisata dapat menjadi salah satu andalan untuk mewujudkan integrasi kemajuan wilayah Provinsi Kaltim. (pd)

Menguak Misteri Monyet Tiga Warna



Lutung Sentarum/Langur Borneo (*Presbytis chrysomelas cruciger*) adalah primata endemik pulau Kalimantan dikategorikan terancam punah (*critically endangered*) oleh *International Union for Conservation of Natures* (IUCN). Tujuan dari survei dan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik habitat, mengidentifikasi jenis dan preferensi pakan, serta menganalisis ketersediaan pakan Lutung Sentarum.

Fakta menarik hutan Kalimantan merupakan habitat sekumpulan monyet dengan jenis yang berbeda-beda, terdapat jenis monyet yang biasanya banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. ada juga sejumlah monyet yang jarang sekali ditemukan di beberapa daerah lain, dan hanya bisa ditemukan di daerah Kalimantan seperti bekantan dan lutung.

Hingar bingar penemuan monyet tiga warna, langur borneo, di Bukit Semujan, pada tahun 2018 oleh tim ekspedisi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (BBTNBKDS) memberikan angin segar bagi para pegiat konservasi khususnya primata. Mengapa tidak, spesies yang sebelumnya hanya diketahui persebarannya di Sarawak dan Sabah Malaysia ini tertangkap kamera tim ekspedisi. Meskipun demikian, kabut masih menyelimuti penemuan langur borneo di Danau Sentarum terkait sebaran, populasi maupun asal mula spesies tersebut.

Penemuan tersebut membuat pihak Taman Nasional menggandeng Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk bekerja sama melakukan penelitian lanjutan. Kerja sama yang dilakukan tersebut juga mendapat dukungan program TFCA Kalimantan tersebut meliputi kegiatan survei bio-ekologi (populasi, sebaran, perilaku, pakan dan habitat) hingga tes DNA dan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK). Survei bio-ekologi dilakukan di empat resort TNBKDS, resort Lupak Mawang, Semangit, Sepandan dan Pulau Majang di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

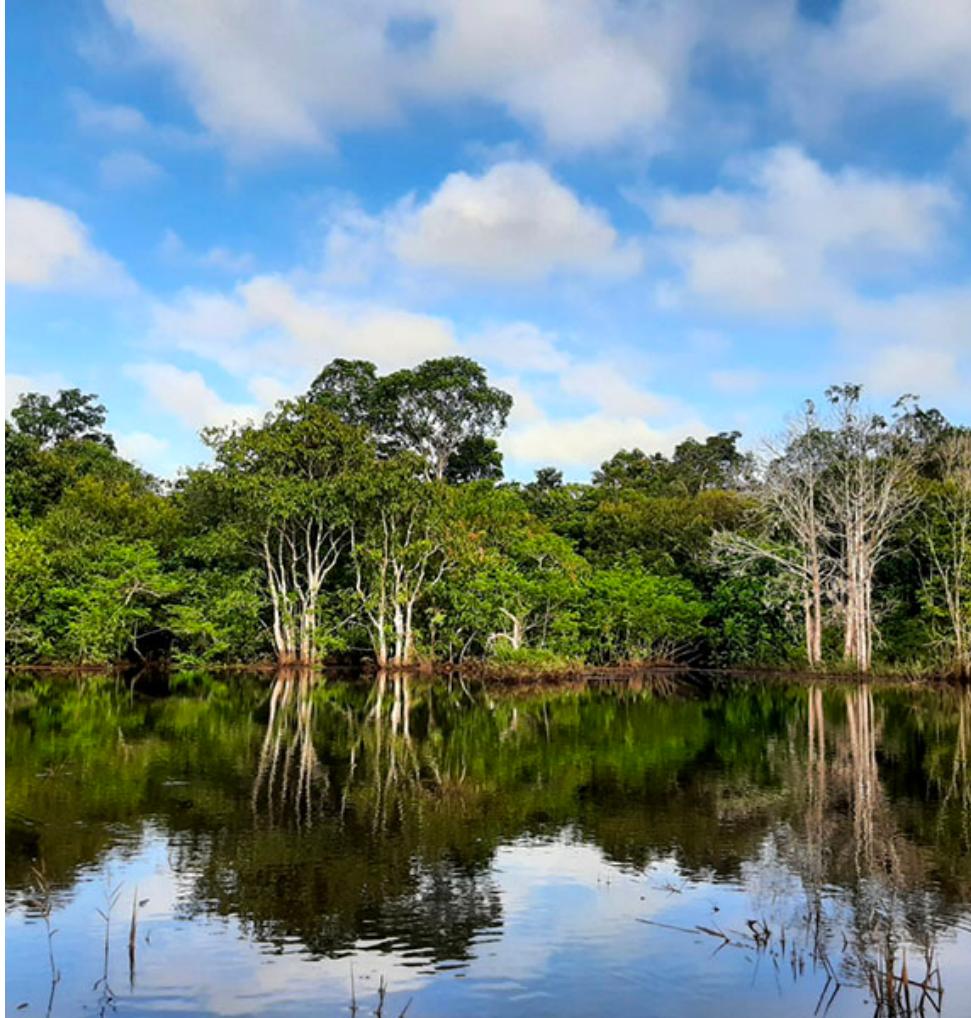


Foto atas:
Pelepasliaran langur borneo/lutung sentarum ke habitat aslinya di Kakah Bajang, Dusun Kenasau, Desa Jongkong Kiri Hilir dilakukan bersama seluruh tim Balai Besar TaNa Bentarum.

Foto bawah:
Pengecekan kesehatan dan pengambilan sampel DNA oleh Tim Ahli serta pelepasliaran ke habitat aslinya



Survei ini perlu dilakukan mengingat data-data mengenai ekologi langur borneo masih minim serta dapat digunakan sebagai data dasar bagi pengelolaan Taman Nasional serta penyusunan SRAK. Untuk mengetahui kekerabatan antara langur borneo yang ditemukan di Malaysia dengan yang ada di Danau Sentarum, maka dilakukan tes DNA. Apakah langur yang ditemukan merupakan spesies yang sama atau spesies baru? (sr)



Lahan Basah Mesangat Suwi, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Si Hitam Siam Penghuni Lahan Basah Mesangat Suwi dalam Daftar Merah

Tren populasi yang terus menurun dengan perkiraan tersisa 500-1000 individu menjadikan Buaya siam [*Crocodylus siamensis*] masuk ke dalam Daftar Merah IUCN dengan status Critically Endangered (CR) yang berarti memiliki resiko kepunahan di alam yang sangat tinggi. Buaya siam atau yang dikenal dengan nama buaya badas ini hidup di lahan basah air tawar seperti danau, rawa maupun sungai yang beraliran tenang.

Persebaran buaya siam terbatas dan hanya ditemukan di Asia Tenggara. Saat ini, Lahan Basah Mesangat Suwi (LBMS) di Kutai Timur dikenal sebagai kantong habitat terakhir dari buaya siam di Indonesia.

Hal inilah yang mendorong Konsorsium Yayasan Konservasi Khatulistiwa (Yasiwa) dan Yayasan Ulin, mitra TFCA Kalimantan siklus 5, bergerak untuk memfasilitasi penguatan forum pengelolaan LBMS yang terdiri dari OPD, NGO, swasta dan masyarakat secara kolaboratif untuk mengelola LBMS.

Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendorong penguatan forum pengelolaan ini. Serangkaian FGD, monitoring dan survei lapang (keanekaragaman hayati, hidrologi dan vegetasi) pendampingan masyarakat serta penyusunan rencana kelola LBMS. Konsorsium juga melakukan kampanye perlindungan LBMS kepada para siswa sekolah SMP dan SMA serta mengajak perguruan tinggi dalam survei dan pengelolaan LBMS. (sr)



Buaya Siam/Badas [*Crocodylus siamensis*]
di Lahan Basah Mesangat Suwi, Kutai Timur



wisata alam hutan mangrove Tembusan, Kecamatan Batu putih, Berau Kaltim

3,8 Ribu Hektar Mangrove di Berau Dimanfaatkan secara Lestari

Ekosistem mangrove mempunyai berbagai fungsi penting, diantaranya sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber pangan, pelindung pesisir, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, berkontribusi sebagai pengendali iklim global melalui penyerap karbon yang akan memainkan peran sangat penting dalam strategi adaptasi perubahan iklim yang bertujuan meminimalisir kerentanan komunitas masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha dimana total luasan terbesar berada di Provinsi Papua sebesar 1.084.514 Ha, sedangkan Kalimantan Timur memiliki kawasan ekosistem mangrove sekitar 331.283 ha atau 10% dari luas mangrove yang ada di Indonesia dan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki mangrove yang terluas di Kalimantan Timur yaitu sekitar 50.000 ha.

Pada tahun 2022, dengan difasilitasi mitra TFCA Kalimantan yaitu Perkumpulan Perisai Alam Borneo dan Yayasan Penyu Berau bersama Dinas terkait, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 483 dan 630 tentang Penetapan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain (APL) Kampung Teluk Semanting dan Kampung Tembusan Sebagai Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Berbasis Masyarakat seluas 3,8 ribu hektar.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keberadaan hutan mangrove dari alih fungsi lahan terutama yang berada di APL untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara lestari. Dengan ditetapkannya fungsi APL tersebut, hal ini menyatakan bahwa Kabupaten Berau adalah Kabupaten yang memiliki komitmen mengelola mangrove secara berkelanjutan berbasis masyarakat. (hss)



Serah terima SK Bupati Berau Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan kepada Kepala kampung Tembusan, Kecamatan Batu Putih, Berau Kaltim - YPB



Penyerahan Chainsaw milik warga secara sukarela di Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring, Kalbar- ASRI

Pembalak Liar di Melawi Menjadi Wirausaha

Kerusakan hutan di Kalimantan sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar hutan. Letak desa yang terpencil membuat mereka memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga tidak memiliki alternatif lain untuk mensejahterakan keluarga kecuali dari hasil hutan.

Sebagai contoh, hal itu terjadi di dua desa yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), yaitu Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring. Keduanya berada di wilayah Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

"Kita harus memiliki ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa mendorong kelestarian hutan," kata Direktur Eksekutif Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) Nur Febriani.

Solusi kreatif yang ditawarkan ASRI beberapa diantaranya adalah Program Chainsaw Buyback bagi penebang liar. Untuk pendanaan, ASRI dibantu dana hibah dari Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan Yayasan KEHATI. Selain dana hibah, masyarakat di sekitar hutan yang mengikuti program tersebut juga mendapatkan bantuan manajerial dan teknis.

Modal UMKM

Dalam Program Chainsaw Buyback, ASRI menyediakan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi para pembalak liar. Untuk menyediakan pekerjaan alternatif bagi para pembalak liar ini, ASRI mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan modal usaha serta pengetahuan berwirausaha.

Para pembalak diajak untuk menyerahkan alat kerja mereka, yaitu gergaji mesin dan kemudian diganti dengan modal usaha serta pelatihan wirausaha. Program ini bertujuan untuk mengubah mereka menjadi pelaku wirausaha mandiri dan tangguh. Febriani menjelaskan, modal usaha yang diberikan sebagai pengganti alat chainsaw adalah modal non tunai. "Modal tersebut bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa barang-barang yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Uang tunainya langsung ditransfer oleh ASRI ke pihak vendor sejumlah harga barang modal yang dibeli, dan masyarakat diajarkan untuk membuat proposal sederhana, berisi rencana usaha dan barang-barang modal yang dibutuhkan. Contoh rencana usaha adalah warung atau kolam ikan dan sebagainya. "ASRI tidak hanya memberikan modal untuk usaha baru, tetapi juga modal untuk memperkuat usaha sampingan yang sudah ada," ujar Nur Febriani.

Program Chainsaw Buyback ini dimulai sejak Maret 2022 dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring. Aparat pemerintah kedua desa tersebut juga mendukung. Tawaran pekerjaan alternatif itu mampu mendorong para penebang liar untuk datang dan menyerahkan gergaji mesin mereka. ASRI mendampingi mereka mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemasaran produk. ASRI tidak bekerja sendirian, tetapi menggandeng Kelompok Sahabat Hutan (Sahut) yang keanggotaannya adalah masyarakat setempat. Sahut inilah yang membantu menyosialisasikan program tersebut ke dusun-dusun.

Analisis prospek dilakukan ASRI bersama calon mitra usaha, bidang peternakan ayam dan ikan sangat potensial digeluti para penebang liar karena tingginya kebutuhan pasar dan harga jual. Untuk mengantisipasi timbulnya kompetisi di masa yang akan datang, ASRI terus melakukan pendampingan secara terus menerus dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kekuatan mental di tingkat keluarga dalam menjalankan usaha baru. Untuk menjalankan program ini, kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengubah kegiatan penebangan hutan secara liar. Selain itu, masyarakat masih meragukan bahwa program ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Nur Febriani menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjamin penghasilan yang lebih banyak setelah pembalak liar beralih pekerjaan. Namun, dia memastikan bahwa program UMKM ini lebih stabil, berkelanjutan dan lebih menenangkan hati sebab tidak takut dikejar-kejar polisi hutan karena mereka sadar yang dilakukan nya itu melanggar hukum. (hw)

Rehabilitasi Mangrove di Delta Mahakam



Dempot Persemaian bibit Mangrove (*Sonneratia caseolaris*), Delta Mahakam, Kutai Kartanegara (YML)



Buah Mangrove (*Sonneratia caseolaris*) yang siap dijadikan benih (YML)

Kata mangrove sering terdengar dalam bahasa keseharian kita. Isitilah mangrove secara umum digunakan juga untuk menunjuk habitat tanaman yang hidup di area genangan air, seperti rawa dan pesisir pantai yang fungsinya sebagai pencegah abrasi pantai dan rumah tempat tinggal bagi beragam spesies ikan, burung, reptil, primata, udang dan kepiting-kepiting.

Degradasi mangrove di kawasan Delta Mahakam belum juga reda. Degradasi kawasan ekosistem mangrove terjadi akibat adanya alih fungsi kawasan menjadi lahan pertambakan yang menempati porsi tertinggi. Hal ini telah berakibat menurunnya kapasitas ekologis kawasan dalam mendukung ekosistem yang terkandung di dalamnya. Dampak langsung yang dirasakan adalah menurunnya produksi budidaya udang/ikan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat lokal karena aktivitas tambak yang menjadi tumpuan mata pencarian warga. Sehingga rehabilitasi mangrove merupakan langkah penting untuk dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya dalam mewujudkan pemulihan kawasan mangrove di Delta Mahakam dengan kegiatan merestorasi lahan.

Tambak yang telah menjadi komitmen bagi para pelaku usaha kawasan tersebut. Silvofishery pun masih menjadi solusi antara tutupan mangrove dan geliat tambak yang menghidupi warga di Delta Mahakam. Salah satunya pada areal pertambakkan di Pulau Letung Desa Muara Badak Ulu dengan menerapkan penanaman mangrove di dalam tambak dengan model silvofishery, yaitu model pengelolaan akuakultur yang mensinergikan aspek lingkungan dengan aspek teknis budidaya perikanan. Kegiatan penanaman telah difasilitasi oleh Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam (YML) dengan dukungan program TFCA Kalimantan-Yayasan KEHATI telah dilakukan penanaman mangrove 30.000 jenis *Rhizophora mucronata* di lahan seluas 31 ha. (hw)



Rehabilitasi mangrove di areal tambak ikan Delta Mahakam, Kalimantan Timur (YML)

LPHD DI KAPUAS HULU BERTEKAD MENJAGA HUTAN DESA

Hutan desa merupakan harta yang tak ternilai harganya. Hutan tersebut warisan dari para leluhur yang harus selalu dijaga. Potensi hutan sangat besar bila dikelola dengan baik. Akibat potensi besar yang mendatangkan keuntungan itu, tidak heran masih ada orang yang menjarahnya.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk hak pengelolaan Hutan Desa. Desa melulu Lembaga pengelola Hutan Desa (LPHD) memiliki kewajiban untuk mengelola hutan desanya, salah satunya melakukan patroli hutan yang bertujuan untuk memastikan tidak ada kerusakan hutan.

Selain itu, dengan patroli hutan LPHD dapat mendokumentasikan flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut. Dengan adanya dokumentasi tersebut bisa diketahui secara luas apa saja flora dan fauna di dalam hutan. Semuanya harus dijaga habitatnya demi keberlangsungan ekosistem hutan itu sendiri.

Salah satu ketua LPHD di Kapuas Hulu Kalbar (LPHD Pundjung Batara) "Kita tentunya bertekad untuk mempertahankan hutan desa Pundjung Batara, ungkap Rusdi ketua LPHD Punjung Batara pada saat memberikan sambutan di acara pelatihan teknik berkegiatan di alam bebas.



Awareness Raising Event

Hal tak kalah penting adalah menanamkan jiwa konservasi dan wawasan lingkungan sejak dini kepada pelajar. Awareness Raising Event atau dikenal dengan Sekolah Lapang Kader Konservasi. Kaderisasi sangat penting dalam mengelola hutan desa. Lewat sekolah lapang kader konservasi ini sebagai upaya melakukan kaderisasi pengelolaan hutan desa. Harapan kedepan, para pelajar yang di kader saat dewasa nanti bisa melanjutkan program konservasi Lembaga Pengelola Hutan Desa.



LPHD Pundjung Batara melakukan Patroli di Hutan Desa Nanga Betung, Kapuas Hulu Kalbar.

Saat ini masih ada orang yang secara diam-diam menjarah atau melakukan hal ilegal di dalam kawasan hutan desa seperti berburu fauna. Namun, alhamdulillah untuk aksi penebangan pohon untuk saat ini tidak ada. Kita sekuat tenaga untuk melakukan patroli agar hutan desa tetap terjaga dengan baik," tambah Ketua LPHD Pundjung Batara.

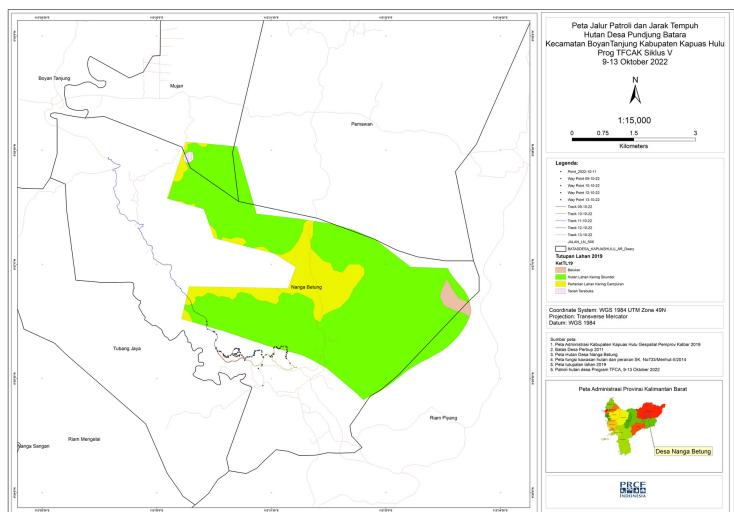
Selain Penjarahan, persoalan utama di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Setiap musim kemarau atau panas tiba, Karhutla selalu muncul hampir di seluruh kabupaten dan kota. Dengan adanya patroli hutan desa sebagai upaya nyata menjaga hutan agar tidak kebakaran.

“Semua tim patroli hutan sudah kita latih bagaimana cara memadamkan api di hutan maupun lahan. Bahkan, peralatan pemadam kebakaran sudah kita siapkan, seperti mesin genset, nozel, pakaian khusus, sampai helm juga sudah disiapkan.

Patroli hutan dilakukan sejak 16 Juli sampai dengan 20 Juli 2022. Dengan adanya patroli tersebut, program Imbal Jasa Ekosistem yang dilakukan oleh PRCF Indonesia telah dimulai di desa tersebut. "Beberapa bulan terakhir memang belum ada program tim patroli hutan desa. Hal ini dikarena adanya evaluasi dan penyusunan program untuk tahun 2022. Sekarang program itu sudah dimulai lagi," kata Fasilitator Konservasi Hutan PRCF Indonesia, Yadi Purwanto S.Hut.

Desa Nanga Betung memulai pertama melakukan patroli hutan desa. Sementara LPHD dari desa lain akan segera menyusul. LPHD Pundjung Batara sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dimulainya program patroli hutan desa tersebut.

Tim patroli hutan dari LPHD Pundjung Batara terdiri dari 20 personil. Sebanyak 20 personil ini dibagi dua kelompok dengan program yang berbeda, yakni Imbal Jasa Lingkungan dukungan TFCA Kalimantan. Mereka ini sudah memiliki pengalaman dalam patroli hutan. Tidak hanya kesiapan fisik yang diutamakan, tapi pengetahuan terhadap flora dan fauna atau hasil hutan bukan kayu sudah mereka kuasai. Apapun yang mereka temukan di dalam hutan akan dicatat dan dimasukkan dengan menggunakan aplikasi Smart Patrol. (hw)



Peta jalur patroli dan jarak tempuh Hutan Desa Pundjung Batara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat



TFCA Kalimantan Promosikan Produk Unggulan KUPS di FDS 2022

Desember Lanjak 2022, Pemda Kapuas Hulu kembali menggelar kegiatan tahunan yang ditunggu oleh masyarakat Kapuas Hulu, yakni Festival Danau Sentarum (FDS) yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 4 Desember 2022. FDS menampilkan beberapa atraksi budaya dan wisata diantaranya Festival Minum Madu, Danau Sentarum Cruise, Lomba Perahu Bidar, Lomba Sumpit, Lomba Pangkak Gasing, Karnaval Budaya, Expo Produk Masyarakat, Sepeda santai, dan Pentas Seni serta Hiburan Rakyat.

Selama empat hari, TFCA Kalimantan bersama para mitra, berpartisipasi di dalam Festival Danau Sentarum 2022. Sebanyak 3.500 madu dalam cangkir bambu turut memeriahkan ajang bergensi yang diselenggarakan setiap tahun.

Minum madu secara masal merupakan salah satu tradisi dalam pelaksanaan pembukaan Festival Danau Sentarum. Pada acara pembukaan tersebut, pejabat dari instansi setempat, dan seluruh masyarakat turut hadir untuk bersama-sama menenguk madu yang merupakan produk unggulan Kabupaten Kapuas Hulu yang berasal dari sekitar kawasan Danau Sentarum.

Festival Danau Sentarum dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, dan didampingi oleh Koordinator Strategi dan Komunikasi Wisata Alam, Budaya, dan Buatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Firnandi Ghufron. Rombongan bupati mengunjungi stand TFCA Kalimantan untuk mencicip madu kemasan mini dan melihat produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di pamerkan.

Dalam festival kali ini, program TFCA Kalimantan turut mempromosikan beberapa produk unggulan mitra KUPS dari desa-desa dampingan, yakni KUPS Air Minum yang dikelola LPHD Pundjung Batara, Desa Nanga Betung, KUPS Anyaman dari LPHD Batang Tau, Desa Sri Wangi, dan KUPS Ikan dari LPHD Nyuai Peningun, Desa Nanga Jemah. KUPS Madu Hutan LPHD Mentari Kapuas, Kopi Robusta LPHD BAHENAP, Sirup, Selai Mawang dan Perjalanan paket ekowisata Kapuas Hulu.

Pameran produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan koneksi pemasaran sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan KUPS. Hal ini sejalan dengan himbauan bupati yang berharap agar Festival Danau Sentarum menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong pemulihhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. (hw)

Perhitungan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di Kabupaten Berau

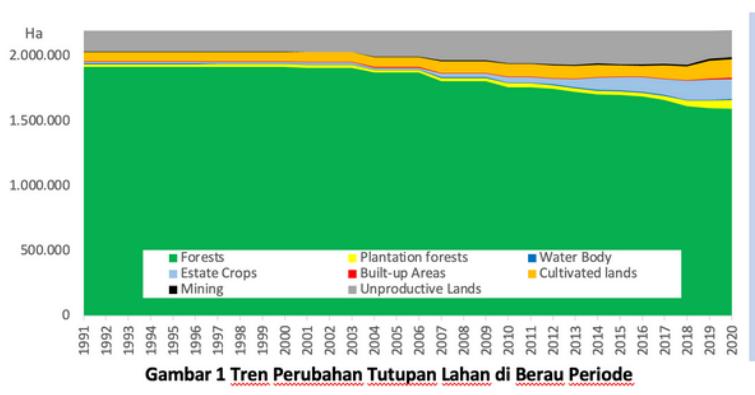
Pada semester satu tahun 2022, tim Konsultan TFCA Kalimantan telah menyelesaikan laporan Kajian Kontribusi Program TFCA Kalimantan pada penurunan emisi GRK PKHB (Program Karbon Hutan Berau). Sebagian hasil dari laporan tersebut ditulis ulang secara ringkas dalam artikel ini sebagai bagian dari penyebarluasan informasi untuk pembelajaran dari pelaksanaan Program TFCA Kalimantan.

Penghitungan emisi GRK di Kabupaten Berau dilakukan dengan mendasarkan pada dua pendekatan yang sudah diakui secara internasional yaitu FREL (Forest Reference Emission Level) Nasional dan FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) Kalimantan Timur. Dalam artikel ini, penulis akan menyampaikan metode dan hasil penghitungan mendasarkan pada salah satu pendekatan yaitu FREL nasional dengan

pertimbangan untuk menghindari kebingungan pembaca yang tidak akrab dengan metode penghitungan emisi GRK. Sementara untuk metode dan hasil dengan pendekatan FCPF Kalimantan Timur akan disampaikan dalam artikel berikutnya.

Metode FREL Nasional adalah pendekatan REDD+ yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaporkan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan kepada sekretariat UNFCCC (United National Framework Convention on Climate Change), telah diverifikasi, dan mendapatkan pengakuan berupa insentif pendanaan RBP (Result Based Payment) dari GCF (Green Climate Fund) ke BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) atas penurunan emisi yang terjadi pada tahun 2014-2016.



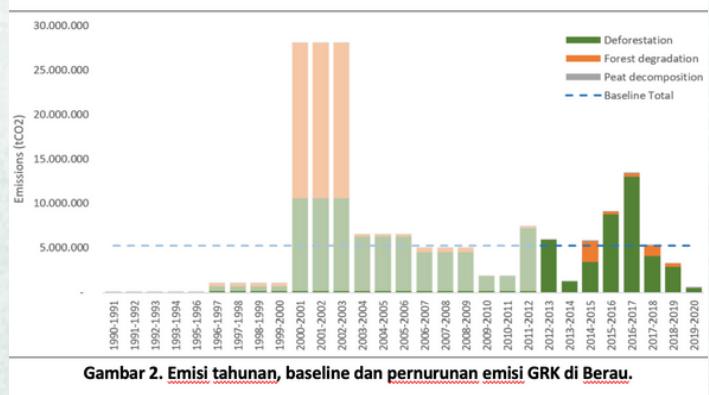


Langkah awal yang dilakukan tim dalam penghitungan emisi GRK menggunakan dengan pendekatan series data spasial mendasarkan dari data SIMONTANA KLHK Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), dan data faktor emisi CO₂ dari aktifitas deforestasi dan degradasi dari biomasa hidup dan gambut.

Dalam pengumpulan data aktifitas mitra dan jaringan kerja TFCA Kalimantan, tim konsultan juga melakukan diskusi langsung dengan para mitra, serta wawancara dengan pimpinan OPD/UPT seperti KPH, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bapelitbang Berau (Gambar 1).

Data yang sudah terkompilasi, selanjutnya dilakukan analisa diantaranya analisa spasial, analisa emisi tahunan, analisa baseline, dan penurunan emisi GRK. Analisa nilai emisi tahunan di Berau menunjukan fluktuasi dimana emisi terbesar terjadi pada kurun waktu 2000-2003 dan 2015-2017. Dari analisa emisi tahunan selanjutnya ditentukan total nilai baseline emisi sebesar 5,1 juta ton CO₂e dengan periode referensi 1990-2012 yang berasal dari emisi deforestasi dan degradasi hutan, serta dekomposisi gambut.

Panjangnya periode referensi diasumsikan cukup mewakili fluktuasi iklim dan dinamika tata kelola sektor kehutanan. Dengan demikian dasar bahwa keyakinan terjadi atau tidaknya penurunan emisi pada periode 2013-2020 juga mewakili perbaikan atau relative sama pada tata kelola sektor kehutanan. Dengan demikian dasar bahwa keyakinan terjadi atau tidaknya penurunan emisi pada periode 2013-2020 juga mewakili perbaikan atau relative sama pada tata kelola sektor kehutanan.



Kesimpulan penghitungan menyatakan bahwa, meskipun secara aggregate pada periode 2013-2020 tidak terjadi penurunan emisi di Berau, namun pada tahun 2013-2014, 2018-2019 dan 2019-2020 terdapat penurunan emisi sebesar 3,9 juta ton CO₂e, 1,9 juta ton CO₂e dan 4,6 juta ton CO₂e (Gambar 2).

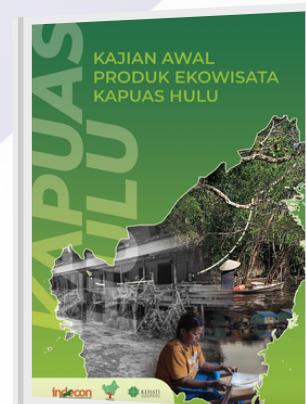
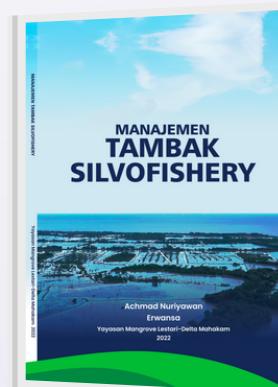
Catatan dan rekomendasi terkait analisa spasial dan emisi yang dapat disampaikan diantaranya:

- (1) perubahan tutupan lahan di Berau dominan terjadi di APL dan Hutan Produksi dimana dapat dikategorikan sebagai deforestasi terencana;
- (2) pencegahan deforestasi dan degradasi tidak dapat dilakukan tanpa intervensi pada perbaikan perencanaan dan implementasi tata ruang, serta perbaikan sistem usaha kayu di hutan produksi;
- (3) secara umum hingga 2020, luasan hutan di Berau masih cukup signifikan untuk kegiatan REDD+. Namun perlu disepakati berapa porsi luasan lahan atau hutan yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan untuk perlindungan agar upaya pengurangan emisi dapat terencana dengan baik;
- (4) metode sistem usaha kayu rendah karbon seperti RIL C, dapat diterapkan agar deforestasi di hutan produksi dapat dihindari dan nilai emisi dari degradasi rendah;
- (5) Hingga 2020, teridentifikasi sekitar 1,5 juta ha lahan tidak produktif yang perlu direncanakan lebih lanjut untuk opsi penguatan usaha ekonomi, reforestasi/aforestasi, atau opsi lainnya agar efektifitas penggunaan lahan tercapai dan secara tidak langsung mencegah deforestasi dan degradasi hutan di area lainya. (awh)



- Dalam pelaksanaan kegiatan, TFCA Kalimantan didukung oleh Technical Assistance Provider (TAP) Pokja PKHB. Buku Pembelajaran Penilaian Peranti dan PSDABM untuk mengukur dan menguatkan kapasitas mitra dalam pelaksanaan program TFCA Kalimantan terkait pengelolaan keuangan dan program.
- Buku Manajemen Tambak Silvofishery ini merupakan pengalaman Yayasan Mangrove Lestari dari hasil pelaksanaan pengelolaan budidaya perikanan di Delta Mahakam, dalam meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari siklus budidaya. Penerapan budidaya ramah lingkungan yang memanfaatkan faktor fisik dan non fisik ekosistem mangrove diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekaligus ikut menjaga kesimbangan dan kelestarian hutan mangrove di kawasan tersebut.
- Pengembangan pariwisata di Kalimantan selama ini sudah berjalan namun skala dan manfaatnya memang belum bisa sebesar yang diharapkan. Buku ini menjelaskan gambaran prospek kepariwisataan di Kalimantan dari sisi produk ekowisata pada dua wilayah di Kalimantan yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Buku mitra



Peringatan Hari Besar
Nasional dan Internasional





Jl. Benda Alam I No.73, RW.4, Cilandak Timur,
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - Indonesia 12560
(021) 78342866